Harian Jogja (Hal.1&8/HL) **Kamis, 15 Mei 2025**

› PROGRAM PEMERINTAH

Pembentukan Koperasi Merah Putih Dipercepat

Akbar Evandio
redaksi@jibinews.co

JAKARTA—Pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjamin proses legalisasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi lebih mudah dan cepat menyusul perjanjian kerja sama yang telah dijalin antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu (14/5). "Melalui MoU ini, saya optimistis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi," ujar Budi Arie seusai acara penandatanganan.

► Halaman 8

Pembentukan Koperasi...

Acara tersebut juga melibatkan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenhum dengan 20 kementerian/lembaga lainnya. Budi Arie meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tingkat desa akan lebih akuntabel, transparan, dan kredibel berkat penguatan payung hukum dan rambu-rambu yang disiapkan. "Kami perkuat payung-payung hukum beserta rambu-rambu agar Kopdes Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," jelasnya.

Ia menekankan kerja sama ini akan melindungi program Kopdes Merah Putih secara hukum dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan seluruh programnya, terutama menyangkut peraturan perundangan, demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. "Kemenkop mendapat tugas menyiapkan 80.000 Kopdes/Kopkel Merah Putih yang harus didaftarkan legalitasnya. Itu bukan pekerjaan biasa," kata Supratman.

Ia mengungkapkan Kemenhum telah mengembangkan inovasi digital untuk mendukung program ini. Ia menyebut sebuah jalur khusus telah disiapkan untuk pendaftaran legalitas Kopdes Merah Putih, yang memungkinkan pendaftaran hingga 1.000 koperasi secara bersamaan dalam waktu satu jam. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi dan mendukung terwujudnya target pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Pendirian Koperasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hampir 10.000 Kopdes telah terbentuk dan dirancang sebagai ujung tombak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. "Sehingga sudah terbentuk sampai tadi [Kamis] sore 9.835 Kopdes. Sampai tadi sore, karena tiap hari berkembang terus," katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5).

Dia menambahkan percepatan pembentukan koperasi ini mengacu pada arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2025 soal Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut Zulkifli, koordinasi lintas kementerian dan kunjungan lapangan telah dilakukan intensif.

"Kami sudah 10 kali rakor, tujuh di Menko Pangan, tiga di lapangan. Selain kementerian juga jalan masing-masing," ungkapnya.

Zulkifli menjelaskan tujuan utama pembentukan koperasi ini yakni untuk memotong rantai pasok yang panjang. "Nanti koperasi ini yang akan menyalurkan seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako, kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai ke Kopdes. Kerja sama-sama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya," jelasnya.

Fungsi Kopdes tak berhenti di sana. Dia juga akan memiliki layanan keuangan dan simpan pinjam, bekerja sama dengan bank milik negara.

Zulhas mengatakan keberadaan Kopdes juga ditujukan untuk mengatasi persoalan klasik di pedesaan yakni ketergantungan pada rentenir dan tengkulak. Meskipun saat ini sudah ada sekitar 130.000 koperasi di Indonesia, Zulkifli menilai banyak yang stagnan. Oleh karena itu, dia menegaskan akan ada pembentukan kopdes baru, selain menjadikan koperasi lama sebagai koperasi desa.

Zulhas memastikan pembiayaan Kopdes Merah Putih tidak diberikan dalam bentuk dana hibah. Pengurus koperasi akan diberikan plafon pinjaman bergulir yang harus dikelola secara produktif dan profesional. Zulhas menyebut plafon awal pinjaman yang disiapkan setiap Kopdes Rp3 miliar, dengan besaran yang bisa disesuaikan tergantung kebutuhan masing-masing koperasi. "Ini plafon Rp3 miliar. Nanti lihat kebutuhan, bisa enggak sampai. Kalau udah maju berkembang bisa juga ditambah."

(Bisnis.com)